

JURNAL KOMUNIKASI

Volume 4, Nomor 2, April 2010

ISSN 1907-848X

Halaman 103 - 205

DAFTAR ISI

Editorial

Framing Media Merekam Feminisme Indonesia

Pratiwi Utami

(103 - 118)

Sinema Independen di Yogyakarta 1999-2008:

Idealisme di Tengah Krisis Infrastruktur

Masduki

(119 - 130)

Banalitas Informasi Jurnalisme Infotainment dan Dampaknya terhadap Penonton

Tri Hastuti Nur R dan Fajar Junaedi

(131 - 142)

Facebook, Silaturahmi, dan Budaya Membaca: Studi Hubungan antara Penggunaan Situs Jejaring Sosial (Facebook) dengan Budaya Silaturahmi dan Membaca di Kalangan Mahasiswa FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fatma Dian Pratiwi

(143 - 154)

Kontestasi Politik dan Rezim Demokrasi Visual di Indonesia

Nyarwi

(155 - 166)

Potret Corporate Social Responsibility (CSR) di Media

Abdul Rohman

(167 - 182)

Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu pada Suratkabar Malaysia (Studi Deskriptif Harian Sinar Harian Selangor)

Razie Bin Nasarruddin dan Anang Hermawan

(183 - 196)

RESENSI BUKU:

Studi Manajemen Media: Dari Mana Berangkat?

Puji Rianto

(197 - 205)

Sinema Independen di Yogyakarta 1999-2008: Idealisme di Tengah Krisis Infrastruktur

Masduki¹

Abstract

The growing up of Indonesian cinema in the period of 1999-2008 was indicated by the development of creative works and community based alternative cinemas or indie movie. Used a qualitative-descriptive method, writer done a small-research in Yogyakarta around April-September 2009 and found some interesting trends. Yogyakarta has become a very dynamic city in Indonesia in term of independent cinema communities. This research also found three connecting areas that support above situation. First, the actively independent communities in the field of university students and non-university students. Second, the openness of alternative bioscope or cinema room such as Kinoki and Yogyakarta based French Cultural Center. Third, some local and regional film festivals held in Yogyakarta that regularly exhibit independent cinema works. The majority of independent cinema production and communities driven by higher attention to cinema as a popular medium for free expression and critical concern to the current social and political situation. The limitation of infrastructure, regulation protected and public support are some obstacles need to be solved in the future.

Keywords:

Cinema, Independent, Film Community, Festival

Pendahuluan

Perkembangan film Indonesia pasca Orde Baru (1999-2008) antara lain ditandai dengan tumbuhnya karya kreatif dan komunitas film alternatif, populer dengan sebutan komunitas film independen (film indie). Selain mencoba mengembangkan pendekatan estetika baru di luar film komersial, komunitas ini juga menggelar pertemuan, diskusi, festival, dan kompetisi. Kegiatan-kegiatan itu ingin memberi ruang publikasi, pemasaran, dan pertukaran gagasan kreatif bagi insan film independen. Produksi film indie di Indonesia umumnya didominasi film dengan format teknologi digital, bersifat personal, dan berdurasi pendek.

Sepanjang periode tahun 1999-2008, menurut data dari Rumah Sinema Yogyakarta, sebuah komunitas film independen, sedikitnya telah digelar 25 festival film alternatif di Yogyakarta. Lebih dari 350 film indie telah diproduksi dalam berbagai format, dan telah tumbuh lebih dari 50 komunitas film. Komunitas-komunitas itu tidak hanya berpusat di kampus berupa kine klub, tetapi tersebar di pusat kebudayaan, pusat komunitas mahasiswa, dan perkampungan seni. Momentum reformasi 1998 rupanya disambut baik komunitas pelajar dan mahasiswa untuk mengolah ekspresi dan

¹ Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

keaktivitas audio visual. Sayangnya, hingga saat ini belum ada pendataan yang komprehensif mengenai perkembangan komunitas film indie ini. Sehingga kecenderungan-kecenderungan kreatif, sikap, dan karakter komunitas tidak terpetakan, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan film nasional yang mengalami kemajuan positif pasca reformasi 1998 (www.rumahsinema.org, diakses Juni 2008).

Dari sini, ada beberapa persoalan empiris yang muncul. *Pertama*, bagaimana fenomena kolaborasi berbagai komunitas film independen tersebut terjadi/terbentuk dalam pertautan atmosfer Yogyakarta? Mengingat, kota ini dikenal sebagai kota seni dan budaya, juga menjadi salah satu pusat tujuan pendidikan yang menonjol di Indonesia. *Kedua*, bagaimana infrastruktur seperti bioskop dan festival film alternatif mewadahi kegiatan komunitas ini? *Ketiga*, apa saja motivasi serta tujuan yang ingin dicapai dan disampaikan komunitas film independen kepada masyarakat luas? Sekadar penghargaan sebagai pekerja kreatif, pengakuan atas kepedulian sosial, atau perlawanan terhadap *status quo* industri film? Beberapa soal inilah yang diteliti dan ingin dikupas dalam tulisan ini.

Memahami Film

Film sebagai disiplin ilmu pengetahuan memiliki dua makna. Kategori pertama, merujuk kepada film sebagai kata benda (*noun*). Film berarti sebuah rekaman cerita yang terdiri dari kumpulan gambar-gambar bergerak dan umumnya dipertunjukkan di televisi atau gedung pemutaran (bioskop). Kata "film" merujuk pula kepada benda fisik yang terbuat dari plastik, sensitif terhadap cahaya, dan akrab dipergunakan dalam produksi fotografi. Benda itu dikenal dengan sebutan *roll* atau *sheet*. Asal kata film sendiri muncul secara historis dari penyebutan film untuk keperluan fotografi atau disebut stok film. Stok film menjadi medium utama untuk perekaman dan penyajian gambar. Kategori makna pertama ini bersifat teknis, mengacu kepada film sebagai alat produksi sebuah karya.

Film juga sering disebut *movie*. Kata "film" sering pula dipadankan dengan kata "sinema", meski keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Film secara akademis dikategorikan sebagai bentuk kesenian populer, menu hiburan massal, dan komoditas bisnis lokal hingga global. Film dihasilkan dengan rekaman menggunakan kamera, dan/atau oleh animasi. Film menurut sutradara legendaris Indonesia Teguh Karya adalah perpaduan seni dan teknologi untuk mengolah gambar bergerak (*moving pictures*) menjadi bentuk tontonan yang memikat. Dalam bahasa ungkapan film, kejadian 10 atau 20 tahun harus bisa diselesaikan dalam satu atau dua jam. Dengan demikian, film bersifat mekanis dan sarat ekspresi simbol (Sen, 1994).

Kategori makna kedua dari film merujuk kepada film sebagai entitas kebudayaan. Pemaknaan ini cenderung sangat luas, multiperspektif, serta berakar kepada pengalaman, pengamatan, dan konteks zaman dari pemberi makna. Ini sekaligus menggambarkan posisi film sebagai subjek dan objek, melintasi batas budaya dan ilmu pengetahuan. Film memiliki makna yang melebihi wujud fisiknya sebagai "benda mati". Film adalah sebuah artefak kebudayaan yang dibentuk oleh suatu budaya tertentu, menggambarkan suatu kebudayaan tertentu pula. Film adalah gambar-hidup atau dalam kosakata Indonesia lama "gambar idoep". Ia memengaruhi kebudayaan dalam

masyarakat. Film dikategorikan sebagai bentuk kesenian yang penting seperti halnya karya sastra, seni rupa, dan sebagainya. Film menjadi sumber dari kebudayaan populer di dunia hiburan dan memiliki kekuatan besar untuk mengembangkan doktrin tertentu baik positif maupun negatif di masyarakat.

Simaklah pendapat kritikus film Perancis Jean-Luc Godard (1970) berikut:

“The cinema is not an art which films life: the cinema is something between art and life. Unlike painting and literature, the cinema both gives to life and takes from it. Literature and painting both exist as art from the very start; the cinema doesn't.”

Hal serupa juga diungkapkan sutradara film legendaris berjudul “Citizen Kane”, Orson Welles:

“A film is a ribbon of dreams. The camera is much more than a recording apparatus; it is a medium via which messages reach us from another world that is not ours and that brings us to the heart of a great secret. Here magic begins.” (Giannetti, 1996).

Seseorang yang bekerja atau terlibat aktif dalam dunia perfilman disebut sebagai sineas atau pembuat film (*filmmaker*). Kedua idiom ini bersifat umum, yang kemudian diperinci lagi dengan sebutan aktor atau aktris untuk pekerja yang membidangi akting, sutradara atau pengarah cerita, penulis skenario, kameramen, penata suara, fotografer, dan sebagainya. Seiring makin kompleksnya proses produksi, sebutan profesional untuk orang yang terlibat dalam film menjadi semakin banyak. Namun demikian, individu terpenting dalam produksi film dalam konteks sebagai karya seni dan kebudayaan adalah sutradara dan penulis cerita atau penulis skenario.

Perkembangan film kontemporer di dunia dan Indonesia yang tercatat dalam sejarah adalah kelahiran generasi pembuat film indie (*indie movie filmmakers*). Tidak hanya di Amerika, generasi film indie eksis di semua negara produsen film. Film indie bercirikan pembiayaan produksi rendah (*low-budget*), dibuat di studio kecil, minimalis, tidak komersial, bersifat seni tinggi, dan berbeda pola penyajian ceritanya dari film *mainstream*. Produksi film independen berkembang oleh kemandirian, sikap kritis terhadap rezim pemodal besar dalam penentuan pola produksi dan distribusi. Yang menarik, gerakan film independen membentuk komunitas khusus termasuk di Yogyakarta.

Komunitas, Pluralitas, dan Perlawanan

Secara konseptual, komunitas berasal dari suku kata Inggris “*community*” yang merujuk pada level ikatan tertentu dari hasil interaksi sosial di masyarakat. Di kamus *Oxford Learner's Dictionary* disebutkan, “*community is all the people living in one place* atau *group of people with the same interest*”. Kecilnya wilayah dan kesamaan keinginan adalah ciri utama komunitas. Secara hirarkis, komunitas berada di level ketiga setelah individu dan keluarga. Komunitas merupakan kumpulan atas sejumlah orang di suatu wilayah geografis yang terikat faktor kerabat atau kepentingan primordial lain, sifatnya beragam, dari yang praktis-pragmatis sampai substantif-ideologis.

Bagaimana sebuah komunitas terbentuk? Atas dasar apa film dianggap muncul dan mewakili sebuah komunitas? Bagaimanakah jika komunitas itu berada pada radius yang berpencar, tidak memusat pada wilayah geografis tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi perdebatan panjang yang belum menemukan kata akhir. Komunitas film independen awalnya lebih tercermin dari dunia akademis dalam bentuk kine klub. Tetapi apakah kine klub dapat mewakili konsep komunitas film independen yang sesungguhnya?.

Komunitas terbentuk oleh dua hal, *Pertama*, kesamaan lokasi dan status sosial. *Kedua*, kesadaran kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diikat oleh proses kerja kolektif. Mana yang lebih dominan sebagai pembentuk suatu komunitas, kesamaan geografi atau kekerabatan yang mengacu pada status sosial? Masing-masing tempat akan berbeda. Ada dua perbedaan proses pembentukan komunitas di masyarakat pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, faktor pembentuk komunitas adalah kesamaan geografis dan ikatan kekerabatan. Sifat pembentuk ini relatif stabil dan tahan lama. Di perkotaan, komunitas terbentuk dari ikatan urban seperti kesamaan profesi, jabatan, kebutuhan praktis untuk saling menjaga keamanan, dan citra diri. Sifatnya labil dan mudah bubar.

Ketika membicarakan film, terdapat tiga aspek mendasar yang saling terkait. *Pertama*, film sebagai subjek kajian ekspresi kebudayaan dan kesenian yang bersifat dinamik. *Kedua*, para kru pembuat film atau artis yang telah membentuk sebuah komunitas, menjadi ikon budaya manusia. *Ketiga*, penonton dan budaya konsumsi film yang heterogen. Peneliti film Louis Giannetti menambah aspek keempat, yakni film sebagai simbol cara berpikir, logika rasional-irasional dalam mengekspresikan, menguraikan, hingga menawarkan solusi atas masalah publik. Penyajian film secara konvensional akan selalu memiliki tiga fondasi alur cerita, yaitu penyajian pembuka yang ditandai momen-momen pengembangan karakter para pelaku dalam bangunan visual tertentu, dilanjutkan dengan penciptaan konflik, dan diakhiri dengan resolusi (Giannetti, 1996).

Film sebagai medium ekspresi memiliki gaya yang identik dengan pola-pola penyajiannya kepada penonton. Setidaknya terdapat tiga gaya penyajian yang memengaruhi analisis atas film. *Pertama*, film realis yang lebih mengutamakan isi film ketimbang bentuknya, misalnya film dokumenter. *Kedua*, film formalis atau gaya penyajian yang lebih mengutamakan aspek artistik, tampilan visual ketimbang cerita atau isinya. *Ketiga*, film klasik atau gabungan kedua gaya terdahulu. Dalam konteks isi, film juga dibagi menjadi tiga, yaitu film dokumenter, film fiksi dan film subjektif yang menggabungkan dua kategori sebelumnya atau tidak sama sekali.

Di Indonesia, industri film identik dengan industri media pada umumnya: terikat dengan ketatnya regulasi pemerintah di zaman Orde Baru dan dominasi pasar komersial kapitalis di era pasca Orde Baru. Regulasi pemerintah terhadap media massa terkait dengan dua pendekatan pengorganisasian media. *Pertama*, pendekatan pasar bebas liberal. Media massa dikelola sektor swasta. *Kedua*, pendekatan negara, yakni institusi media diorganisir oleh negara. Di samping itu, ada juga pendekatan ketiga yakni pengorganisasian institusi media yang tidak berdasarkan mekanisme pasar dan pengelolaan negara. Ini sering disebut sebagai pendekatan publik (*public service*). Model

ini menghindari kelemahan pada model pengorganisasian pasar dan negara. Film merupakan salah satu sumber daya media penting bagi pemerintah sehingga harus diregulasi sedemikian rupa.

Dalam aliran Marxis, negara mempunyai kepentingan sendiri sebagai lembaga yang tidak selalu dikontrol kaum borjuis. Perkembangan kapitalisme monopoli dan teori tentang peran negara dalam hal peran kelas yang memerintah dan kepentingan kapital secara keseluruhan, menimbulkan konsep teoritis tentang "teori kapitalisme negara monopolis". Pemikiran ini selaras dengan gejala kian akrabnya penguasa-pemodal melalui kemenangan atas gugatan kelompok generasi baru pasca 1998 dalam industri film. Fenomena ini terjadi atas adanya dominasi sejumlah *production house* yang dimiliki sineas asing. Apakah kondisi kritis ini juga menjadi spirit eksisnya sineas film indie?

Gerakan untuk menjadi independen dalam produksi film bisa dikaitkan dengan dua tujuan dalam konteks demokratisasi. *Pertama, freedom of publication*. Ini merupakan dasar demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat, menyampaikan informasi dan mengetahui kebenaran. Kebebasan pers memungkinkan adanya kontrol, kritik, dan pendapat menjadi diskursus sehari-hari, termasuk soal kebebasan produksi film. Kebebasan publikasi ini penting untuk memunculkan pemerintahan dan rakyat yang cerdas atau dalam konteks film menjadi kreatif. Media lebih independen dalam perannya sebagai penyeimbang dan *watchdog* terhadap institusi kekuasaan dan masyarakat.

Kedua, terjaminnya plurality of ownership. Pluralitas kepemilikan dan kendali produksi film merupakan hal penting untuk mengurangi bias monopoli pemilik media. Semakin plural kepemilikan media termasuk *production house* dan bioskop, maka isi media juga terdorong untuk jadi semakin beragam. Persoalannya menyangkut seberapa jauh kekuasaan pemilik atas isi media. Namun dalam sejumlah studi di berbagai negara sebagaimana dilakukan Altschull (1984) dalam *Seven Laws of Journalism*-nya dikatakan, "*content of the media always reflect the interest of those who finance them*" (McQuail, 1987).

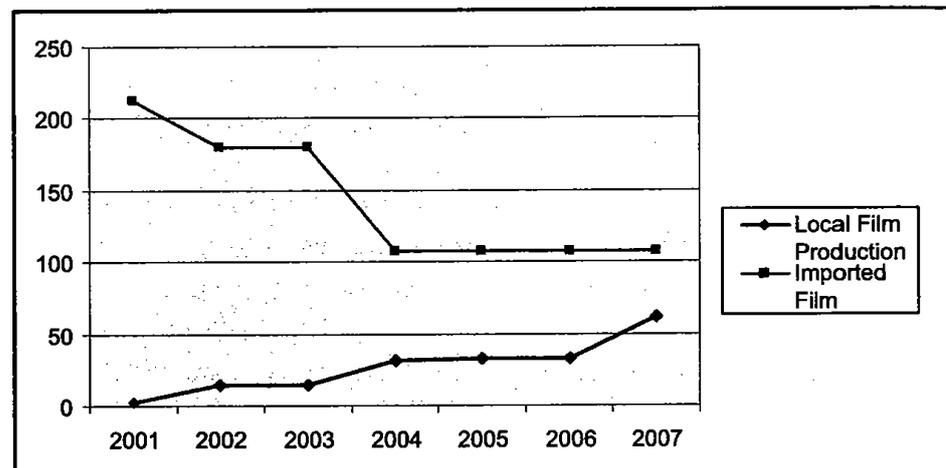
Setiap kepemilikan yang berbeda mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perspektif isi media. Karena itu perlu terjamin adanya pluralitas pemilikan dan arus produksi film dan meniadakan *barrier to entry* bagi pendatang baru. Jika memang memiliki konsep yang lebih baik untuk memasuki dunia film, siapapun bisa. Dalam konteks ini, perlu regulasi melalui UU tentang film di tingkat nasional. Juga Peraturan Daerah yang adaptif untuk menutup kemungkinan konsentrasi, terjadinya monopoli horizontal (kepemilikan di satu tangan terhadap berbagai media sejenis), ataupun monopoli vertikal (pemilikan institusi bisnis film dari hulu ke hilir), misal PH, pemain dan jalur distribusinya.

Era film Indonesia tahun 1998-2008 populer disebut sebagai era pasca Orde Baru. Era ini ditandai munculnya film hasil persilangan antara kebebasan berekspresi, momentum teknologi digital, dan berkiprahnya generasi baru insan film. Konsep ini berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka datang dari kampus, sebagai aktivis yang mewakili kaum urban dengan spirit menjadikan film sebagai media ekspresi. Film independen dapat disebut pula sebagai film "*microcinema*" karena penggunaan

teknologi alternatif yang lebih murah, mudah, dan ringkas ketimbang teknologi industri dan studio.

Di bawah rezim reformasi pasca 1998, film Indonesia diwarnai dua arus sekaligus, yaitu tumbuhnya kembali film cerita panjang dengan pendekatan produksi yang lebih bertumpu pada kekuatan estetika, dan tumbuhnya film-film independen dengan format digital. Beberapa sutradara yang mewakili generasi baru ini adalah Garin Nugroho, Riri Riza, Rudi Soedjarwo, Nia Dinata, Nan Triveni Achnas, Hanung Bramantyo, dan Lola Amaria. Selain membuat film, mereka aktif dalam advokasi untuk kebangkitan film nasional melalui diskusi, festival, dan lobi pada forum film berskala lokal dan internasional.

Tema-tema yang sebelum era Orde Baru sangat sensitif dan dilarang menjadi pilihan dalam film pasca reformasi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan politik, biografi politik seperti Soe Hoek Gie, konflik kelas sosial dan disorientasi seksual dan etnis non-pribumi. Setelah sempat mencapai jumlah produksi di atas 100 buah tahun 1991 dan menurun drastis tahun 1998, secara perlahan jumlah produksi film nasional mengalami peningkatan seperti tampak dalam grafik di bawah ini.



Sumber: Kusuma, 2007

Infrastruktur Perfilman Indonesia

Dua infrastruktur penting dalam pertumbuhan film di negara manapun adalah keberadaan ruang menonton atau bioskop yang kompetitif dan forum festival film yang kredibel dan meriah. Apabila bioskop menyediakan ruang untuk menguji sukses-tidaknya sebuah peredaran film secara komersial dan sosial, maka forum festival menyediakan ruang kompetisi yang mengacu kepada pencapaian estetika dan karir akting. Bioskop dan festival bisa dianggap sebagai dua institusi yang terpisah dan bisa pula menyatu (Sen, 1994). Festival film kerap digelar di bioskop atau melibatkan bioskop sebagai media apresiasi, sementara itu pemilik bioskop dan penonton kadang menggunakan parameter penilaian festival untuk memilih memutar atau menonton sebuah film.

Bioskop alternatif sebagai pusat berkumpulnya komunitas film indie bermunculan di kampus perguruan tinggi yang memiliki perhatian khusus atas film, pusat-pusat kebudayaan dan outlet penjual VCD/DVD film. Bioskop alternatif pada

umumnya tidak memutar film secara permanen setiap hari dan menyajikan film komersial. Pemutaran film di bioskop alternatif Indonesia tidak murni sebagai gagasan pengelola kampus, pusat kebudayaan, dan/atau pemilik bioskop lokal/jaringan, tetapi merupakan kolaborasi mereka dengan masyarakat penonton dan kritikus/pegiat film yang prihatin atas nasib film-film seni (*art film*). Misalnya penggunaan salah satu unit pada gedung Cineplex 21 di kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta untuk hanya memutar film khusus (*art cinema*) yang dikelola bersama oleh pemilik studio 21 TIM dengan komunitas film indie.

Sejumlah negara asing yang membangun pusat kebudayaan di Indonesia secara rutin menggelar festival film berupa pemutaran dan diskusi di bioskop yang menyatu dengan pusat kebudayaan setempat. Misalnya pusat kebudayaan Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Hampir setiap tahun pusat kebudayaan Perancis dan Jerman menggelar festival film seni yang diproduksi di kedua negara untuk publik film di Indonesia. Bahkan kedutaan besar kedua negara ini membiayai festival film lokal seperti Jakarta International Film Festival (JIFFEST) setiap tahun. Mereka menghadirkan sutradara kenamaan untuk berdialog dengan komunitas film di Indonesia, membagi pengalaman dan semangat memperkaya kreativitas, perjuangan bagi kemajuan film.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengambil objek di Yogyakarta, khususnya kawasan komunitas film independen, pusat kebudayaan dan kampus perguruan tinggi. Penelitian ini menelusuri data relevan terkait film yang tersedia, melakukan studi lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahapan. *Pertama*, penelusuran dokumen buku, situs, majalah, jurnal dan artikel yang mengupas perkembangan komunitas film independen di Indonesia khususnya di Yogyakarta sepanjang tahun 1999-2008. *Kedua*, pengamatan terhadap kegiatan festival dan aktivitas pemutaran/pertemuan antar komunitas film independen yang terjadi di Yogyakarta baik di kampus maupun pusat kebudayaan. *Ketiga*, wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait khususnya pegiat film independen, pengelola bioskop alternatif dan penyelenggara festival film independen di Yogyakarta.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena ia mampu menangkap berbagai fenomena dengan deskripsi yang teliti dan penuh nuansa yang lebih berharga daripada sekadar pernyataan jumlah atau frekuensi (Sutopo, 1996). Jenis data mencakup narasumber atau informan, peristiwa atau aktivitas, benda, beragam teks, gambar, atau rekaman terkait fenomena film independen dan komunitasnya. Dokumen, arsip teks dan audio visual sebagai data adalah yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas fokus penelitian. Sumber data utama penelitian ini adalah dokumen yang terkait dengan fenomena pertumbuhan film independen, informan dari kalangan aktivis film independen, dan lokasi atau aktivitas pada forum festival film yang berlangsung di Yogyakarta dan sekitarnya.

Komunitas Film Independen

Tanpa bermaksud mengecilkan keberadaan aktor dan bidang lain yang berkontribusi dalam pertumbuhan film independen di Yogyakarta tahun 1999-2008, maka riset ini menemukan dan memilih tiga bidang dan aktor yang berkelindan dalam perkembangan film independen di Yogyakarta dan sekitarnya.

Ketiga bidang dan aktor tersebut adalah: *Pertama*, komunitas film independen yang diwakili Fourcolour, Lima enam (keduanya dari sektor di luar kampus), serta Chiko dan 12,9 AJ (keduanya dari sektor kampus perguruan tinggi). *Kedua*, keberadaan ruang pemutaran atau bioskop yang diwakili Kinoki dan Lembaga Indonesia Perancis (LIP). *Ketiga*, festival film reguler yang memfasilitasi eksibisi dan promosi di tingkat lokal atau internasional film independen, diwakili oleh Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) dan Festival Film Dokumenter (FFD). Tentunya ketiga bidang dan aktor ini tidak dianggap mewakili potret komunitas film independen keseluruhan di Yogyakarta.

Riset lapangan sekitar 6 bulan (Maret-Agustus 2009) di Yogyakarta menemukan fenomena menarik mengenai komunitas film independen. Yogyakarta menjadi salah satu kota yang paling dinamis di Indonesia dalam pertumbuhan film independen dan komunitasnya. Dari segi formulasi isi visual, terdapat dua tipologi utama film independen. *Pertama*, film dengan tema bebas dan berformat fiksi. *Kedua*, film dengan format dokumenter. Jumlah pasti produksi film independen sepanjang 1999-2008 di Yogyakarta tidak dapat dilacak, karena tidak ada pusat data yang baik dan sistem komunikasi antarkomunitas film independen yang juga belum baik. Namun demikian, dalam catatan harian Kompas dan penelusuran dari peneliti, setidaknya dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1
Komunitas Film di DIY

Komunitas	Alamat
Kine Klub Komako UGM	Jl. Socio Justicia 1, Bulaksumur
Kine Klub Muhammadiyah Multimedia UMY	Jl. Kapten Pierre Tendean 56 Wirobrajan
Gank One Production AKINDO	Jl. Laksda Adisucipto, Babarsari
HIMA TV ISI	Jl. Parangtritis Km. 6,5 Sewon Bantul
Kine Klub IMAKO STPMD 317	Jl. Timoho 317, Gondokusuman
Rumah Sinema	Kawasan Jalan Kaliurang, sekarang pindah ke kawasan Melati Wetan
Studio Audio Visual PUSKAT	Jl. Ahmad Jazuli 2, Kotabaru
Kelompok Limaenam	Perum Nogotirto 2 Jl Bali F 112 Mlati
Kelprod501	Kricak Kidul TR I/1352 RT 29/07 Mlati
Komunitas Jagad Film	Jl. Sudagaran TR III/1071 Gedongtengen
NAWA/Padhang Jingglang	Jl. Kaliurang Km. 6 Pandega Padma II/13A Yogyakarta

Fourcolours Community	Jl. Ketenda 160 RT 02/38 Banguntapan Bantul
Just Kidding Video Explore	Kawasan Seni Nitiprayan Bantul
Nol's Movie	Kampus FISIP UAJY Kampus FISIP Babarsari
Sanggar Sinematografi Akindo	Kampus AKINDO Jl. Laksda Adisucipto, Babarsari
SASKINE Klub Fakultas Ilmu Budaya UGM	Jl. Nusantara 1, Bulaksumur
Kompor.Com Komunikasi UII	Jurusan Komunikasi UII Kampus Terpadu Jl. Kaliurang Km 14,5
12,9 AJ Kineklub	Fisip UAJY Babarsari, Sleman
Jamaah Cinema Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga	Kampus UIN Sunan Kalijaga Jl. Laksda Adisucipto
Komunitas Visual LSM LKIS	Babadan Baru, Banguntapan Yogya

Data awal di atas menunjukkan eksisnya dua kelompok dominan: komunitas film independen yang berbasis kampus dan komunitas berbasis non-kampus. Meski secara personal para aktivis di kedua kelompok tersebut berinteraksi secara terbuka, masing-masing komunitas memiliki karakter dan dinamika aktivitas yang relatif berbeda.

Proses terbentuknya komunitas film independen di Yogyakarta dimotivasi oleh minat yang tinggi terhadap film sebagai medium ekspresi alternatif. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, yaitu sikap kritis terhadap fenomena sosial, eksistensi personal-komunitas, hingga adaptasi terhadap pertumbuhan teknologi produksi film secara digital. Di tengah keterbatasan finansial dan akses distribusi, produksi film independen dilakukan dengan pendekatan *low budget*. Berkarya dengan mengambil *setting* Yogyakarta lebih diutamakan, sedangkan distribusi menjadi pertimbangan kedua. Ketiadaan *database* yang memadai menyebabkan jumlah pasti komunitas dan total produksi film tidak bisa diketahui dengan akurat.

Dari segi motivasi, komunitas film independen dan karya mereka awalnya lahir dari idealisme eksistensi personal, kemudian berkembang ke arah "gerakan protes" terhadap film arus utama beserta infrastruktur yang mewadahnya. Keadaan ini didukung atmosfir Yogyakarta sebagai kota kreatif dan kota budaya yang egaliter.

Kolaborasi berbagai komunitas film independen di Yogyakarta terjadi/terbentuk dalam kawah pertautan atmosfir Yogyakarta sebagai kota seni, kota budaya, dan salah satu tujuan pendidikan kreatif di Indonesia. Kolaborasi komunitas film independen terbentuk dari interaksi yang formal dan non-formal baik perkuliahan di kampus, forum apresiasi/festival film hingga kompetisi film secara reguler di Yogyakarta. Kolaborasi terjadi di antara tiga bidang: komunitas film dari kampus dan non-kampus, penyelenggara festival, dan bioskop alternatif yang tumbuh didukung lembaga internasional.

Infrastruktur seperti bioskop dan festival film alternatif yang sudah beroperasi cukup mewadahi kegiatan komunitas, mendukung eksistensi film dan komunitas film

independen tidak hanya pada level distribusi dan eksibisi, tetapi pelatihan dan seminar. Meski masih menghadapi kendala finansial dan SDM, forum festival dan bioskop alternatif tetap tumbuh di atas model kolaborasi yang tidak hanya berskala lokal dan nasional, tetapi internasional. Mereka menjadi penyelenggara eksibisi dan sanggar kerja yang mempertemukan sineas lokal Yogyakarta dengan sineas luar negeri.

Dua festival film terbesar yang 10 tahun terakhir rutin diselenggarakan di Yogyakarta adalah Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) dan Festival Film Dokumenter (FFD). Festival ini digelar oleh komunitas-komunitas film indie dan memberi ruang eksibisi bagi pegiat film independen, sekaligus merupakan “ikon” festival film di Indonesia. Beberapa festival serupa juga pernah digelar, namun berskala kecil dan tidak sepenuhnya diselenggarakan oleh komunitas film independen di Yogyakarta, misalnya festival film Q, film Perancis, dan sebagainya.

Dua bioskop alternatif yang aktif dan rutin menggelar pemutaran film independen di Yogyakarta adalah Kinoki dan Lembaga Indonesia Perancis. Kedua lembaga ini beroperasi secara nirlaba, berkebalikan dengan MOVIE BOX, bioskop kecil di kawasan Gejayan yang beroperasi secara komersial. Kinoki sejak tahun 2008 berkolaborasi dengan Taman Budaya Yogyakarta menggelar pemutaran rutin. Beberapa bioskop alternatif juga berkembang di lingkungan kampus, misalnya di aula Fakultas Ilmu Budaya dan FISIPOL UGM, FISIPOL Universitas Atmajaya, dan Universitas Muhammadiyah. Namun bioskop di kampus ini secara fisik tidak bersifat permanen dan acaranya pun digelar musiman. Eksistensi festival dan bioskop alternatif tidak sekuat komunitas film independen.

Penutup

Film independen akan sangat ditentukan oleh dua hal. *Pertama*, terawatnya sikap independen para sineasnya. *Kedua*, iklim dan infrastruktur yang menunjang kondisi pertama. Persoalan serius yang harus dihadapi komunitas film independen adalah minimnya dukungan proteksi dan infrastruktur yang lebih memadai, sebagaimana kota-kota besar pusat perfilman dunia. Budaya kreatif dan egaliter yang dimiliki komunitas tidak sepenuhnya didukung oleh agenda pemerintah. Maka pihak terkait sebaiknya meluaskan apresiator, membangun infrastruktur, membuka dialog sinergis antara komunitas yang sudah relatif senior dengan junior, sehingga proses regenerasi komunitas film independen bisa lebih terpola. Pemerintah daerah perlu berinisiatif memfasilitasi perkembangan film independen, diawali dialog untuk menemukan formula kebijakan yang tepat.

Riset ini amat terbatas dari segi temuan data kuantitatif produksi film independen dan catatan-catatan empiris yang lebih detail terkait dinamika festival-festival film dan proses kreatif produksi film independen di Yogyakarta. Sehingga penelitian lanjutan diperlukan, dan fokus kepada salah satu dari tiga objek, yaitu komunitas film, festival atau bioskop alternatif agar ditemukan data yang lebih komprehensif. Penelitian dengan metode partisipatif, *focus group discussion*, dan sejenisnya juga diperlukan agar diperoleh data sosiologis yang lebih dalam dan membongkar jauh idealisme komunitas film independen.

Daftar Pustaka

- Giannetti, Louis. 1996. *Understanding Movies*. USA: Prentice Hall.
- Kusuma, Veronica. "Negotiating the Power: MFI and The Search for Oppositional Power", makalah dipresentasikan di *The 4th South East Asia Cinema Conference*, Jakarta, 17-19 Desember 2007.
- Masduki. "Fenomena Film Indie", dalam *Kedaulatan Rakyat* edisi Rabu, 30 Mei 2001.
- McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar (ed. II)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sen, Krishna. 1994. *Indonesian Cinema*. London: Zed Books.
- Sutopo. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- www.rumahsinema.org, diakses 12 Juni 2008.

